



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2026



Prepared for :
SAKIP 2026



ditpraska



Dit Prasarana KA



djka.kemenuh.go.id/ditprasaranaka



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CATUR WICAKSONO**
Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

CATUR WICAKSONO
NIP 197004191995031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026 merupakan pemenuhan terhadap amanat Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Pelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu unit organisasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian berusaha menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 yang merupakan proses penting agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya melalui indikator – indikator kinerja yang direncanakan sehingga akuntabilitas kinerja dapat lebih mudah ditingkatkan.

Dengan telah disusunnya Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026, diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian semakin terarah menuju terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

CATUR WICAKSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197004191995031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
I.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	I-2
I.4 STRUKTUR ORGANISASI	I-3
BAB II RENCANA STRATEGIS	II-1
II.1 TUJUAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025-2029	II-1
II.2 SASARAN DAN INDIKATOR DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025 – 2029.....	II-1
A. SASARAN KEGIATAN	II-1
B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	II-3
II.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PRASARANA PERKERE TAAPIAN TAHUN 2025-2029	II-13
II.4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029	II-22
A. TARGET INDIKATOR	II-22
B. KERANGKA PENDANAAN	II-24
II.5 DUKUNGAN RPJMN	II-25
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2026	III-1
III.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	III-1
III.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA.....	III-4
III.3 ALOKASI ANGGARAN	III-8
BAB IV PENUTUP	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 sebagai dokumentasi atas kesepakatan kinerja yang terukur sesuai dengan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mengimplementasikan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026 maka setiap jajaran unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada target Indikator Kinerja Utama yang berbassis *outcome*.

Perjanjian Kinerja ini selanjutnya disusun dengan tetap menyesuaikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk menetapkan target kinerja dan sebagai acuan pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran pengembangan dan peningkatan dibidang prasarana perkeretaapian dan menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

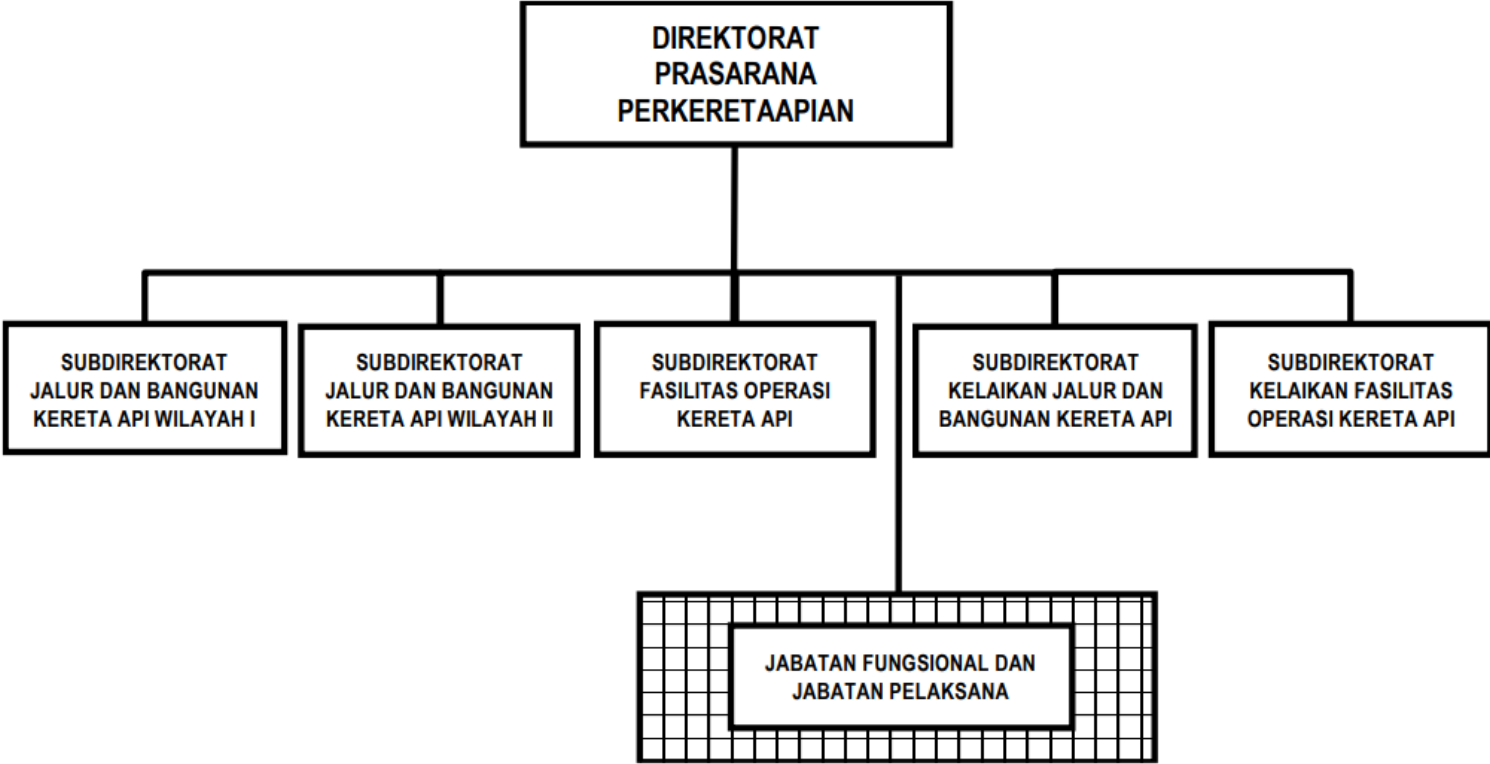
Sedangkan tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur yang ingin dicapai dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :



1.4. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

2.1. TUJUAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025-2029

Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan / cascading tujuan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan. Tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

- A. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian
- B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian

2.2. SASARAN DAN INDIKATOR DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 2025 - 2029

A. Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan

konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan prasarana perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK 1)
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
- 2) Sasaran Kegiatan 2 (SK 2)
Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian
- 3) Sasaran Kegiatan 3 (SK 3)
Meningkatnya Keandalan Prasarana mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- 4) Sasaran Kegiatan 4 (SK 4)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran Kegiatan 1 (SK1), Sasaran Kegiatan 2 (SK2) dan Sasaran Kegiatan 3 (SK3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian. SK1, SK2 dan SK3 ini merupakan penurunan langsung dari Sasaran Program (SP) di level Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2) Sasaran Kegiatan 4 (SK4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Internal *Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.



Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan, serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

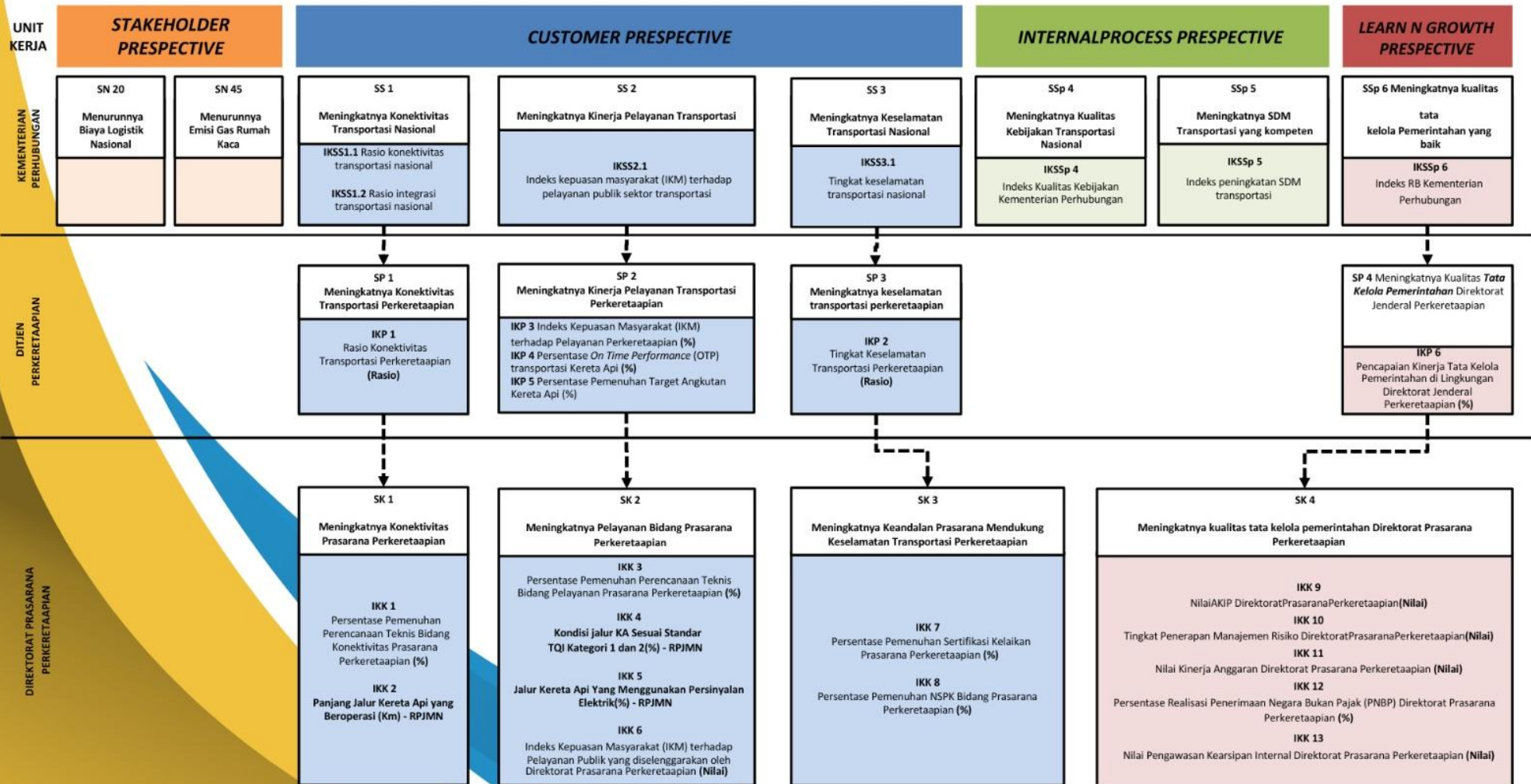
Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Transportasi terkait bidang perkeretaapian termasuk dalam Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang, yaitu Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang.

B. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Indikator kinerja kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian





Tabel II.1 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung konektivitas (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> <p>Tata Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>= $\frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d tahun 2029}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d tahun 2029}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	Pembangunan Panjang Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Jalur yang di reaktivasi	<p>Satuan : Km</p> <p>Definisi : Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat</p> <p>Tata Cara Perhitungan :</p> $\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} = \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi}$ <p>Sumber Data : Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian /baseline tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	Pengesahan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan pada periode Renstra 2025-2029</p> <p>Tata Cara Perhitungan:</p> $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan Perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Kategori I dan II (kecepatan > 80 Km/Jam)	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\frac{\text{Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2}}{\frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	Fasilitas operasi kereta api (<i>Interlocking</i> sistem persinyalan kereta api elektrik diwilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi)	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah unit fasilitas operasi berupa interlocking sistem persinyalan kereta api yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking sistem persinyalan kereta api existing dan periode Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <div><div>Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik</div><div>=</div><div><div>Jumlah Unit <i>Interlocking</i> Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan</div><div><div>Jumlah Unit <i>Interlocking</i> Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029</div><div>X 100%</div></div></div><p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola Kereta Api/ Badan Usaha</p></div>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Target RPJMN dan sesuai dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Penyiapan pemberian Bimbingan Teknsi dan Supervisi dibidang Prasarana Perkeretaapian) serta dukungan RPJMN 2025-2029	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian melalui Survey Aplikasi 3A IPK (Indeks Persepsi Korupsi) – IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1-4)</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																										



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p>Tata cara perhitungan:</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi</p>			
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian (Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi) yang sudah disertifikasi/ memiliki sertifikat kelaikan prasarana	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Persentase Pemenuhan Kebutuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	NSPK yang telah ditetapkan/ diusulkan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri Jalur dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi serta Kelaikan Jalur	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029</p> <p>Tata cara perhitungan:</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	dan Bangunan KA serta Fasilitas Operasi	<p> $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$ </p> <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian</p>	anggaran yang tersedia		
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Hasil Penilaian AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian oleh Evaluator (Nilai skala 1-100)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Inspektorat Jenderal</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat)	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Merupakan Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai 0 – 30)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																							
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)				ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																
		<table><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr><tr><td>1</td><td>0 – 7</td><td>Initial</td></tr><tr><td>2</td><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td></tr><tr><td>3</td><td>15 – 20</td><td>Defined</td></tr><tr><td>4</td><td>21 – 25</td><td>Managed</td></tr><tr><td>5</td><td>26 - 30</td><td>Optimised</td></tr></table> <p>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$ <p>Sumber Data: Inspektorat Jenderal</p>	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1	0 – 7	Initial	2	8 – 14	Repeatable	3	15 – 20	Defined	4	21 – 25	Managed	5	26 - 30	Optimised			urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat)	
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																						
1	0 – 7	Initial																						
2	8 – 14	Repeatable																						
3	15 – 20	Defined																						
4	21 – 25	Managed																						
5	26 - 30	Optimised																						
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;• 80% - 90%: Kategori Baik;• 60% - 80%: Kategori Cukup;• 50% - 60%: Kategori Kurang;• Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.				Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia dan megacu kepada nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat)	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029																



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<p>Tata cara perhitungan:</p> $NKA = \frac{\text{Nilai Kinerja Atas Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$ <p>Sumber data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian/ Aplikasi Monev Kemenkeu</p>	pelaksanaan anggaran		
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan	<p>Satuan: Persen (%)</p> <p>Definisi: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada tahun berjalan</p> <p>Tata cara perhitungan:</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}}$ <p>Sumber Data: Direktorat Prasarana Perkeretaapian/Aplikasi Omspan Kemenkeu</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada perhitungan target rencana penyelesaian perizinan dan Sertifikasi dibidang prasarana perkeretaapian	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat)	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100)	<p>Satuan: Nilai</p> <p>Definisi: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan</p>	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun	Selaras dengan proses bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian (penyiapan pemantauan, analisis,	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2029



INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																
		<table><tr><th colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</th></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 80 -90</td><td>A (Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>CC (Cukup)</td></tr><tr><td>> 30 – 50</td><td>C (Kurang)</td></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D (sangat Kurang)</td></tr></table> <p>Tata cara perhitungan:</p> <p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> <p>= (Nilai pengelolaan arsip dinamis × 70%) + (Nilai sumber daya kearsipan × 30%)</p> <p>Sumber Data: Sekretariat Jenderal Perhubungan (Kepala Biro Umum)/ Setditjen Perkeretaapian</p>	KETERANGAN KATEGORI		> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	> 80 -90	A (Memuaskan)	> 70 – 80	BB (Sangat Baik)	> 60 – 70	B (Baik)	> 50 – 60	CC (Cukup)	> 30 – 50	C (Kurang)	> 0 – 30	D (sangat Kurang)	sebelumnya nilai pengaawasan kearsipan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian dan penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat)	
KETERANGAN KATEGORI																					
> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)																				
> 80 -90	A (Memuaskan)																				
> 70 – 80	BB (Sangat Baik)																				
> 60 – 70	B (Baik)																				
> 50 – 60	CC (Cukup)																				
> 30 – 50	C (Kurang)																				
> 0 – 30	D (sangat Kurang)																				



2.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan serta Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 1 (T1) Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIP Nasional (AK1), Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan (AK2), Reaktivasi jalur kereta api mati (AK4), dan Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Penyusunan Survey Invetigasi Desain/Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design yang mendukung konektivitas 2. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Bimbingan Teknis bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan Perkeretaapian (AK7)	1. Pengukuran kualitas jalur rel KA menggunakan hasil pengukuran kereta api ukur 2. Monitoring dan evaluasi peningkatan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan Basic Engineering Design dan Detail Engineering Design prasarana perkeretaapian yang mendukung pelayanan 4. Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan 5. Pelayanan bidang Prasarana Perkeretaapian
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) Meningkatnya Kehandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK14), Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian (AK17), dan Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian (AK18)	1. Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian 2. Peningkatan sertifikasi sistem dan komponen peralatan prasarana perkeretaapian 3. Penyusunan NSPK



Tujuan	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Tujuan 2 (T2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Sasaran Kegiatan 4 (SK 4) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Mendukung Peningkatan pencapaian nilai AKIP (AK19), Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (AK20), Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA (AK21), dan Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (AK23)	1. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Evaluasi Penyelenggaraan AKIP 3. Penyelenggaraan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian 4. Evaluasi Manajemen Risiko 5. Penyusunan review dan penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan 6. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditpraska 7. Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditpraska 8. Peningkatan penatausahaan serta kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditpraska 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian 10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian 11. Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis 12. Peningkatan Sumberdaya Kerasipan 13. Evaluasi Kearsipan

Dalam penyusunan arah kebijakan Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Isu Strategis dapat menjadi tolak ukur untuk memastikan kesesuaian pengambilan Keputusan/kebijakan terhadap permasalahan dan tugas Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi direktorat serta isu strategis adalah sebagai berikut:



Tabel II.3 Keterkaitan antara Tujuan , Sasaran, dan Indikator Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Isu Strategis

Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian (%)	a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	a. Kondisi dan keterbatasan prasarana kereta api yang sudah berumur, b. Target panjang rel kereta api di dalam RIP Nasional cukup tinggi yang mana ditargetkan sampai tahun 2030 sudah terbangun 10.524 km (termasuk kereta api api perkotaan 3.755 km). c. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera dalam menghubungkan jalur kereta api di Sumatera bagian selatan dengan Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara masih terkendala dan belum optimal. d. Kendala dan hambatan pengadaan lahan dan dampak sosial lingkungan yang menghambat pembangunan prasarana perkeretaapian yang dominan diakibatkan dampak sosial dan lingkungan.
		IKK 2 Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian	



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	IKK 3 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	a. Kondisi rel kereta api masih terdapat jenis rel R42 sepanjang sekitar 700 km, R33 sepanjang sekitar 271 km, dan R25 sepanjang sekitar 110 km. b. Kondisi jalur rel yang andal menjadi faktor utama dalam menjamin keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan perjalanan kereta. Untuk itu, pengukuran TQI diperlukan sebagai dasar pemantauan kesehatan jalur secara objektif dan terukur. Tanpa data TQI, perawatan rel cenderung reaktif, tidak tepat sasaran, dan berpotensi melewati kerusakan dini yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan atau bahkan kecelakaan. c. Belum terbangunnya jaringan kereta api perkotaan metropolitan yang terhubung dengan pusat aktivitas dan bisnis. Sebagai contoh kereta api commuter Bandung Raya relasi layanan Padalarang-Cicalengka saat ini kapasitasnya 40 ribu pnp/hari, seharusnya bisa ditingkatkan menjadi 200 ribu pnp/hari (dapat dilakukan dengan peningkatan elektrifikasi jalur kereta api) dan belum diintegrasikan rencana pembangunan perumahan di sekitar stasiun (potensi pengembangan TOD perkotaan).
		IKK 4 Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%)	a. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. b. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian	d. Belum optimalnya pemanfaatan sistem database dan sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian. Saat ini sudah ada kemajuan signifikan dalam digitalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian, antara lain sistem pemesanan tiket terintegrasi, sistem kontrol lalu lintas terpusat, penerapan teknologi IoT. Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi masalah integrasi, data yang tidak akurat, biaya/ investasi yang tinggi, tantangan keamanan siber, serta sumber daya manusia yang belum memadai. Peluang dalam peningkatan pemanfaatan teknologi



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
		IKK 5 Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	<p>a. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p>	<p>melalui pemanfaatan analitik data besar, pengembangan aplikasi berbasis AI dan integrasi sistem informasi yang lebih luas.</p> <p>e. Kualitas pelayanan transportasi secara kualitatif dapat diukur melalui tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan jasa transportasi. Secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang prasarana diatas 3,524 (terkategori A (Sangat Baik)). Untuk transportasi perkeretaapian, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada tahun 2024 mencapai 3,88 dan pada tahun 2025 mencapai 3,89. Kepuasan masyarakat, juga dapat dilihat dari penilaian publik terhadap kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam penerbitan izin pembangunan dan izin perpotongan dan/atau persinggungan dengan prasarana perkeretaapian.</p>
		IKK 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan</p> <p>b. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian</p>	



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
			analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	
Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kebutuhan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan berkelanjutan, dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program infrastruktur konektivitas Direktorat Prasarana Perkeretaapian	SK 3 Meningkatnya Keandalan mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 7 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	<ol style="list-style-type: none">penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.	<ol style="list-style-type: none">Kecelakaan kereta api masih ada (belum Zero Accident) khususnya yang melibatkan kondisi prasarana perkeretaapianMasih terbatas jumlah sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi bidang prasarana perkeretaapian. Beberapa kendala dan hambatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang prasarana perkeretaapian antara lain: belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi sumber daya manusia, keterbatasan kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Perlu adanya dorongan lembaga profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan/diklat dan bimbingan teknis terkait teknologi perkeretaapian.Tantangan yang dihadapi dalam menjaga agar prasarana perkeretaapian tetap terjaga keandalannya adalah kaitannya dengan biaya perawatan prasarana. PT Kereta Api Indonesia (persero) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk merawat prasarana perkeretaapian melalui Infrastructure Maintenance Operation (IMO) menghadapi tantangan dana dan materiil dalam kaitannya dengan perawatan sarana dan prasarana, terutama dengan masih adanya backlog antara biaya



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
		IKK 8 Presentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p> <p>b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian</p>	<p>pendanaan yang diberikan melalui IMO masih belum menutup biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Ke depan perlu adanya perbaikan tata kelola baru dengan kecukupan dana sehingga masalah keamanan bisa menjadi kenyataan di sistem operasi perkeretaapian.</p> <p>d. Pada dasarnya anggaran IMO digunakan untuk perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk meningkatkan daya saing dan keselamatan kereta api. Selama ini, alokasi anggaran IMO belum sesuai kebutuhan dan belum dapat dipenuhi oleh pemerintah sesuai kebutuhan karena keterbatasan dana APBN. Pemerintah perlu merumuskan instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis perkeretaapian. Sejumlah instrumen lain yang bisa membantu keuangan dan bisnis KAI adalah dengan meninjau ulang formulasi biaya Track Access Charge (TAC) agar dapat dikurangi dan penambahan IMO.</p> <p>e. Keterbatasan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia penguji yang masih belum optimal. Keberadaan prasarana perkeretaapian yang tersebar di beberapa lokasi (Jawa, Sumatera dan Sulawesi) menyebabkan kurang optimalnya pelayanan pengujian prasarana dan sumber daya manusia prasarana perkeretaapian. Ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian dan sumber daya manusia penguji serta pemeliharaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian termasuk penyediaan satuan pengujian di daerah agar pelayanan pengujian prasarana perkeretaapian bisa lebih cepat.</p>



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang berintegritas dan adaptif dengan indikator nilai rata-rata capaian kinerja program Dukungan Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian	SK 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK 9 Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	a. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. b. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	a. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Prasarana Perkeretaapian selaku regulator penyelenggara prasarana perkeretaapian. Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Direktorat Prasarana perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai reguasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada. b. Kebutuhan terhadap norma, standarisasi teknis, pedoman dan kriteria terhadap penerapan teknologi prasarana perkeretaapian yang cepat sehingga dapat mengantisipasi penerapan teknologi perkeretaapian terbaru. Perlu diperhatikan juga terkait dengan peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan. c. Pembangunan perkeretaapian selama ini masih dominan didanai dari APBN, sehingga ketergantungan APBN masih cukup besar. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran APBN, pembangunan perkeretaapian masih belum mampu mewujudkan jaringan kereta api sesuai dengan harapan di dalam dokumen RIP Nasional 2030. Beberapa capaian pembangunan jalur kereta api masih kurang dibandingkan target. d. Belum optimalnya pemanfaatan skema pendanaan kreatif, sehingga ke depan perlu adanya pembiayaan alternatif baik melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pinjam dan Hibah (PHLN) dan alternatif pendanaan lainnya, termasuk skema Land
		IKK 10 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	a. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian. b. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	
		IKK 11 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	
		IKK 12	a. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia,	



Tujuan Ditpraska	Sasaran Kegiatan Ditpraska	Indikator Kinerja Kegiatan Ditpraska	Tugas Pokok dan Fungsi Ditpraska	Isu Strategis
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.</p> <p>b. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian.</p>	<p>Value Capture sebagai sumber pendanaan potensial untuk pengembangan perkeretaapian.</p> <p>e. Penataan dan pemanfaatan aset perkeretaapian yang belum sepenuhnya optimal. Ke depan perlu dilakukan peningkatan manajemen aset agar aset dapat dikelola dengan baik dan mampu lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kemanfaatan. Diharapkan dengan manajemen aset yang lebih akuntabel akan berdampak pada peningkatan PNBP bidang perkeretaapian secara maksimal.</p> <p>f. Potensi dan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang prasarana perkeretaapian yang belum sepenuhnya tergali sebagai sumber pendanaan alternatif.</p> <p>g. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang prasarana perkeretaapian untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan kereta api yang belum optimal. Pembaruan teknologi baik di sarana maupun prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengoperasian kereta api akan menjadi salah satu penentu daya saing dan kualitas layanan moda kereta api di masa yang akan datang. Informasi yang tepat, cepat dan akurat akan memberikan penekanan yang lebih baik dalam menunjang perkeretaapian yang sudah bertransformasi menjadi lebih modern, efisien dan berkelanjutan.</p>
		IKK 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.	



2.4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung kebijakan nasional, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan 2 tujuan yang dilengkapi 4 sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan kondisi yang diharapkan secara nyata oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan merupakan cermin pengaruh atas kinerja dari beberapa kegiatan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan capaian, tiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada setiap tahun anggaran untuk akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian untuk terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) harus dapat terukur dan dilaporkan secara berkala. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan bidang prasarana perkeretaapian, juga digunakan sebagai alat evaluasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Target indikator kinerja kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan sebagai berikut:



Tabel II.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025-2029

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET KINERJA				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	21,43	21,43	28,57	42,86	100,00
		IKK 2	Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi	Km	6.928,00	6.928,00	6.937,00	6.937,00	6.937,00
SK 2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK 3	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	30,20	33,90	44,07	98,31	100,00
		IKK 4	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		IKK 5	Jalur Kereta Api Yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	66,34	67,96	70,23
		IKK 6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89
SK 3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK 7	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,58	62,79	76,47	86,50	100,00
		IKK 8	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	86,36	93,18	100,00
SK 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK 9	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	84,40	85,45	86,40
		IKK 10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	19	20	21	22	23
		IKK 11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	85,75	85,75	85,85	85,95	86,05
		IKK 12	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		IKK 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	78,56	78,56	80,19	81,70	83,03



B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya seperti regulasi pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian
Tahun 2025-2029 berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
Kode	Nama	2025	2026	2027	2028	2029
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	366.519.036	54.393.555	56.094.103	1.713.064.684	1.684.700.000
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	100.396.955	82.550.000	80.000.000	2.500.000	0
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	3.017.854	4.320.399	6.977.699	7.634.142	8.354.164
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	885.110	6.431.332	1.367.782	1.504.560	1.655.016
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	1.195.412	1.323.049	1.444.348
4601	Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	2.098.163	16.181.129	7.359.713	7.940.732	8.647.104
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.284.049	40.160.734	29.431.618	25.674.781	29.642.259
4603	Pengelolaan dan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	970.144	1.393.180	3.027.998	3.036.753	3.262.634
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	230.000	1.424.614	1.567.075	1.709.537	1.851.998
Jumlah		508.379.636	244.027.458	222.946.930	1.811.237.883	1.790.661.407

2.5. DUKUNGAN RPJMN

Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menetapkan tiga Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam RPJMN sebagai dukungan terhadap target RPJMN antara lain :

Indikator RPJMN	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indikator Kegiatan Prioritas (KP) - Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang							
Indikator KP1 : Panjang Jalur KA yang Beroperasi	km	6.880 (2023)	6.928	6.928	6.937	6.937	6.985
Indikator KP2 : Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik	%	63 (2023)	65	66	67	68	70
Indikator KP3 : Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	93,85 (2023)	94	95	96	97	98

Selain itu, Direktorat Prasarana Perkeretaapian juga mendukung beberapa kegiatan prioritas yang tertuang dalam RPJMN antara lain :

1. Surabaya Regional Railway Line (SRRL) Phase I;
2. Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; dan
3. Engineering Services Of Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage II.



BAB III RENCANA KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2026

3.1. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 dengan menyajikan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome). Dalam pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026 berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2025-2029, dengan formulasi pengukuran indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Manual Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung konektivitas (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan konektivitas pada periode Renstra 2025-2029</p> $\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan teknis bidang konektivitas s.d tahun 2029}} \times 100\%$
Panjang Jalur KA yang Beroperasi (Km)	<p>Penjumlahan secara kumulatif panjang kereta api di Indonesia yang dibangun dan laik beroperasi. panjang jalur kereta api yang operasional, termasuk jalur ganda dan jalur yang direaktivasi dan semakin bertambah nilai indikator, semakin tinggi jumlah jaringan kereta api yang beroperasi maka akan meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat</p> $\text{Panjang Jalur KA yang Beroperasi} = \text{Panjang jalur KA (sampai dengan Tahun Berjalan-1)} + \text{Panjang jalur KA yang di bangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi}$
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang prasarana mendukung pelayanan (DED, SID, dll) sesuai dengan rencana peningkatan pelayanan bidang prasarana perkeretaapian periode Renstra 2025-2029</p> $\text{Persentase Pemenuhan Perencanaan teknis bidang pelayanan prasarana perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah penetapan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan s.d. Tahun berjalan dan Jumlah Kebutuhan Penetapan Dokumen Perencanaan teknis bidang pelayanan s.d tahun 2029}} \times 100\%$



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																									
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 (%)	<p>Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur dengan hasil Kategori I dan II (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan total panjang jalur KA pada tahun berjalan.</p> $\text{Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2} = \frac{\text{Panjang Jalur KA yang Telah Diukur dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan}}{\text{Total Panjang Jalur KA pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$																									
Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik (%)	<p>Jumlah unit interlocking fasilitas operasi yang berbasis elektrik s.d tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah unit interlocking fasilitas operasi eksisting pada tahun berjalan.</p> $\text{Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik} = \frac{\text{Jumlah Unit Interlocking Sistem Persinyalan Kereta Api berbasis Elektrik s.d Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Unit Interlocking Sistem Persinyalan Kereta Api pada Tahun Berjalan dan Rencana Pembangunan/Pengembangan s.d Tahun 2029}} \times 100\%$																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (Nilai skala 1 -4)</p> <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,524 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> <p>Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p> $\text{IKM Per Bulan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah Nilai IKM s.d Bulan Ke-n}}{n}$	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																						
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																						
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																						
4	3,524 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																						
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan dan kebutuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun berjalan sampai dengan tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis :</p> $\text{Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana} = \frac{\text{Jumlah prasarana perkeretaapian (jalur, stasiun, fasilitas operasi) yang tersertifikasi kelaikan s.d tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Sertifikasi Kelaikan s.d tahun berjalan dan kebutuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029}} \times 100\%$																									
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian (%)	<p>Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029 :</p> $\text{Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah Disusun dan Ditetapkan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah NSPK bidang prasarana perkeretaapian yang disusun dan ditetapkan s.d. tahun berjalan dan}} \times 100\%$																									



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																		
	kebutuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan s.d. tahun 2029																		
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I. Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)																		
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan <table><tr><th>No.</th><th>Total Skor Manajemen Risiko</th><th>Simpulan Level</th></tr><tr><td>1</td><td>0 – 7</td><td>Initial</td></tr><tr><td>2</td><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td></tr><tr><td>3</td><td>15 – 20</td><td>Defined</td></tr><tr><td>4</td><td>21 – 25</td><td>Managed</td></tr><tr><td>5</td><td>26 - 30</td><td>Optimised</td></tr></table> <p>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian:</p> $= \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 1}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 1}} + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 2}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 2}} + \dots + \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran pada pertanyaan 15}}{\text{Jumlah pengumpulan data pada pertanyaan 15}}$	No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level	1	0 – 7	Initial	2	8 – 14	Repeatable	3	15 – 20	Defined	4	21 – 25	Managed	5	26 - 30	Optimised
No.	Total Skor Manajemen Risiko	Simpulan Level																	
1	0 – 7	Initial																	
2	8 – 14	Repeatable																	
3	15 – 20	Defined																	
4	21 – 25	Managed																	
5	26 - 30	Optimised																	
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: <ul style="list-style-type: none">• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;• 80% - 90%: Kategori Baik;• 60% - 80%: Kategori Cukup;• 50% - 60%: Kategori Kurang;• Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang. $\text{NKA} = \frac{\text{Nilai Kinerja Atas Perencanaan Anggaran} + \text{Nilai Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran}}{2}$																		
Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian (%)	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian pada tahun berjalan $\text{Persentase Realisasi PNBP} = \frac{\text{Realisasi PNBP Direktorat Prasarana Perkeretaapian}}{\text{Target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100$																		



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TATA CARA PERHITUNGAN																
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Nilai)	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian diperoleh dari hasil penilaian dari Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan pada waktu berjalan (periode tahunan) berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI nomor 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan.</p> <table><tr><th colspan="2">KETERANGAN KATEGORI</th></tr><tr><td>> 90 – 100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 80 -90</td><td>A (Memuaskan)</td></tr><tr><td>> 70 – 80</td><td>BB (Sangat Baik)</td></tr><tr><td>> 60 – 70</td><td>B (Baik)</td></tr><tr><td>> 50 – 60</td><td>CC (Cukup)</td></tr><tr><td>> 30 – 50</td><td>C (Kurang)</td></tr><tr><td>> 0 – 30</td><td>D (sangat Kurang)</td></tr></table> <p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian: $= (\text{Nilai pengelolaan arsip dinamis} \times 70\%) + (\text{Nilai sumber daya kearsipan} \times 30\%)$</p>	KETERANGAN KATEGORI		> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)	> 80 -90	A (Memuaskan)	> 70 – 80	BB (Sangat Baik)	> 60 – 70	B (Baik)	> 50 – 60	CC (Cukup)	> 30 – 50	C (Kurang)	> 0 – 30	D (sangat Kurang)
KETERANGAN KATEGORI																	
> 90 – 100	AA (Sangat Memuaskan)																
> 80 -90	A (Memuaskan)																
> 70 – 80	BB (Sangat Baik)																
> 60 – 70	B (Baik)																
> 50 – 60	CC (Cukup)																
> 30 – 50	C (Kurang)																
> 0 – 30	D (sangat Kurang)																

3.2. TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020, Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2026 disusun berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 serta berdasarkan pagu anggaran sesuai DIPA nomor : SP DIPA – 022.08.1.467484/2026 dengan pagu efektif sesuai Revisi POK ke-1 sebesar Rp. 223.912.477.000,- dari pagu total tahun anggaran 2026 sebesar Rp. 477.701.287.000,-.

Pada setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan perlu ditetapkan target kinerja guna sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sehingga kinerja di tahun 2026 dapat dicapai dengan baik atau masih *on the right track*, dengan target perindikator kinerja sebagaimana berikut:

3.2.1 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

Pada Sasaran Meningkatnya konektivitas Prasarana Perkeretaapian terdapat 2 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dan Panjang Jalur KA yang Beroperasi, dengan rincian target kinerja sebagai berikut :

Tabel III.3

Indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA	TARGET PK 2026
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14	24,14	24,14
Jalur KA yang Beroperasi	Km	6.915,12	6.928	6.915,12

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan target sebesar 24,14% sesuai dengan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2025-2029. Baseline tahun 2026 merupakan realisasi sampai dengan tahun 2025 terdapat sebesar 7 dokumen. Pada tahun 2026 tidak ada penambahan penetapan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian, sesuai dengan proses bisnis pada tahun 2026 masih dalam tahap penyusunan dan akan ditargetkan penambahan pada tahun 2027.

Indikator kinerja kegiatan Panjang Jalur KA yang Beroperasi. Indikator Kinerja Kegiatan ini merupakan Amanah RPJMN tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Baseline tahun 2026 merupakan realisasi sampai dengan tahun 2025 yaitu dengan realisasi sebesar 6.915,12 Km dan pada tahun 2026 belum direncanakan penambahan pada Indikator Kinerja Kegiatan Panjang Jalur KA yang Beroperasi.

3.2.2 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian

Pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2, Jalur Kereta Api Yang Menggunakan Persinyalan Elektrik, serta Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian target kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4

Indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA	TARGET PK 2026
Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	33,90	33,90	35,59
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	94,64	95,00	95,00
Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,21	65,53	65,53
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana	Nilai	3,90	3,89	3,90

Penetapan Target Tahun 2026 berdasarkan perhitungan kebutuhan penyusunan perencanaan teknis bidang pelayanan prasarana perkeretaapian. Baseline Tahun 2026 ditargetkan sebesar 35,59%, penambahan pada tahun 2026 sebesar 1 Dokumen.

Indikator Kinerja Kegiatan Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 dengan baseline hasil pengukuran pada periode III tahun 2025 sebesar 94,64% dan ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 95,00% sesuai dengan target Renstra dan Target RPJMN.

Indikator Kinerja Kegiatan Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan baseline sebesar 65,21% dan ditargetkan terdapat realisasi peningkatan sinyal mekanik ke sinyal elektrik sebanyak 2 unit pada tahun 2026 sesuai dengan target Renstra dan Target RPJMN.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana dengan target 3,90 sesuai dengan realisasi kinerja tahun 2025.

3.2.3 Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Pada Sasaran Meningkatnya Keandalan mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dan Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian target kinerja sebagai berikut :



Tabel III.5

Indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA	TARGET PK 2026
Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	50,85	62,79	62,79
Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	79,55	79,55	81,82

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan baseline merupakan realisasi sampai dengan tahun 2025 dan ditargetkan penambahan pada tahun 2026 sebesar 62,79% atau dengan penambahan penetapan sertifikat 268 sertifikat.

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian target 2026 sebesar 81,82% terdapat penambahan pada tahun 2026 sebanyak 1 dokumen NSPK.

3.2.4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pada Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan rincian target kinerja sebagai berikut :

Tabel III.6

Indikator pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA	TARGET PK 2026
Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,20	83,50	83,50
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20,00	20,00	20,00
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	83,66	85,75	85,75
Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	100	100	100,00



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET RENSTRA	TARGET PK 2026
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	85,02	78,56	85,02

Indikator Kinerja kegiatan Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan baseline sebesar 83,20 dan ditargetkan terdapat peningkatan pada tahun 2026 menjadi sebesar 83,50, pertimbangan penentuan target berdasarkan Target Renstra dan Realisasi tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 20,00. pertimbangan penentuan target berdasarkan Target Renstra dan Realisasi tahun 2025.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85,75. pertimbangan penentuan target berdasarkan Target Renstra dan Realisasi tahun 2025.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 100%. pertimbangan penentuan target berdasarkan Target Renstra dan Realisasi tahun 2025.

Indikator kinerja Kegiatan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 85,02. pertimbangan penentuan target berdasarkan Target Renstra dan Realisasi tahun 2025.

3.3. ALOKASI ANGGARAN

Rencana Kerja Anggaran per Sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada Tahun 2026 dapat dikelompokkan sebagai berikut :



Tabel III.6
Tabel Anggaran Masing - Masing Indikator Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	POK Awal	POK Rev Ke-1	
				PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
1.	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	50.000.000.000	50.000.000	50.000.000
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi	7.699.544.000	6.146.179.000	6.146.179.000
2.	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	82.550.000.000	81.575.000.000	81.575.000.000
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	1.014.410.000	582.580.000	582.580.000
		Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	6.431.332.000	3.828.973.000	3.828.973.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.900.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000
3.	Meningkatnya Keandalan Prasarana mendukung	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	18.854.582.000	15.742.879.000	15.742.879.000



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	POK Awal	POK Rev Ke-1	
				PAGU (Rp.)	PAGU EFEKTIF (Rp.)
	Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	36.487.281.000	36.079.851.000	36.079.851.000
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.393.180.000	770.086.000	770.086.000
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.424.614.000	825.903.000	825.903.000
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	33.215.004.000	278.843.338.000	25.054.528.000
		Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.410.000.000	830.001.000	830.001.000
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1.647.511.000	1.026.497.000	1.026.497.000
				477.701.287.000	223.912.477.000

Sedangkan anggaran per masing-masing jenis belanja tahun 2026 pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian :

Tabel III.6
Tabel Anggaran Masing - Masing Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU REVISI KE-1 (Rp.)	BLOKIR/EFISIENSI (Rp.)	PAGU EFEKTIF SESUAI REVISI KE-1 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.	Belanja Barang	97.652.458.000	332.940.038.000	253.788.810.000	79.151.228.000
3.	Belanja Modal	146.375.000000	144.761.249.000	-	144.761.249.000
	- Rupiah Murni	33.325.000.000	31.711.249.000	-	31.711.249.000
	- PHLN	113.050.000.000	113.050.000.000	-	113.050.000.000
	- SBSN	-	-	-	-
TOTAL		244.027.458.000	477.701.287.000	253.788.810.000	223.912.477.000

BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan, meliputi :

Sasaran 1. Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

- a. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan target 24,14%
- b. Panjang Jalur KA yang Beroperasi dengan target 6.915,12 Km

Sasaran 2. Meningkatnya PELAYANAN Bidang Prasarana Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sebagai berikut:

- a. Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian dengan target 35,59%
- b. Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 dengan target 95,00%
- c. Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik dengan target 65,53%
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target 3,90

Sasaran 3. Meningkatnya Keandalan mendukung KESELAMATAN Transportasi Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian dengan target 62,79%
- b. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian dengan target 81,82%

Sasaran 4. Meningkatnya kualitas TATA KELOLA pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target nilai 83,50
- b. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target nilai 20,00
- c. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target 85,75
- d. Presentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target Nilai 100%
- e. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan target 85,02%

Dengan program utama di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian sebagaimana yang tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Demikian Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2026 yang akan dilaksanakan dan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

----- Selamat Bekerja -----

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian
		Panjang Jalur KA yang Beroperasi
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian
		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) Kategori 1 dan 2
		Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24,14
		Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi	Km	6.915,12
2	Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	35,59
		Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	95,00
		Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65,53
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3,90
3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	62,79
		Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	81,82
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83,50
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20,00
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,75
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85,02

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS

- a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian
- b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
- c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

- a. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN EFEKTIF

Rp.	184.616.900.000
Rp.	109.393.447.000
Rp.	63.050.000.000
Rp.	12.173.453.000
Rp.	39.295.577.000
Rp.	39.295.577.000
Rp.	223.912.477.000 00

Disetujui,

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Plt. DIREKTUR PRASARANA
PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



CATUR WICAKSONO
NIP 197004191995031001



Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab			
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember					
Sasaran Kerja Pengembangan, peningkatan dan perawatan prasarana perkeretaapian																		223,912,477,000	Direktur Prasarana Perkeretaapian			
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	%	24.14	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretaapian		24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	50,000,000,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II 2. Kantor Perencanaan Teknis MRT EW dan SRRL			
					-	12,981,654,174	12,981,654,174	12,981,654,174	25,963,308,348	25,963,308,348	25,963,308,348	35,699,548,978	35,699,548,978	35,699,548,978	45,435,789,608	50,000,000,000						
					Dokumen	11	Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	0		0	2	4	4	6	8	6	8	11	50,000,000,000	Kantor Perencanaan Teknis MRT EW dan SRRL		
								-	12,981,654,174	12,981,654,174	12,981,654,174	25,963,308,348	25,963,308,348	25,963,308,348	35,699,548,978	35,699,548,978	35,699,548,978	45,435,789,608	50,000,000,000			
					Panjang Jalur KA yang Beroperasi	Km	6915.12	Jumlah panjang jalur kereta api yang terbangun	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6915.12	6,146,179,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II
									1,317,956,360	1,490,093,540	1,593,182,595	1,842,976,160	2,126,810,655	2,627,100,095	3,039,158,715	3,414,634,515	4,196,786,035	4,940,344,680	5,458,351,840	6,146,179,000		
									11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	1,473,175,000	Kantor PPK Kegiatan Rutin dan Sewa Lahan
								1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,272,770,000	1,473,175,000				
					Sertifikat	8	Biaya Pendampingan Pensertifikatan BMN Berupa Tanah LRT Jabodebek dan MRT East West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	145,380,000	Kantor PPK Urban Transport dan Lahan
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,145,000	78,620,000	145,380,000	
Laporan	2	Biaya Operasional dan Biaya Pendukung (BOP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,318,000	Kantor PPK Urban Transport dan Lahan				
			45,186,360	67,779,540	90,372,720	271,118,160	474,456,780	655,202,220	856,540,840	1,084,472,640	1,400,777,160	1,717,081,680	1,988,199,840	2,259,318,000								
Laporan	2	Biaya Jasa Penilai KIPP MRT East West dan LRT Jabodebek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	376,931,000	Kantor PPK Urban Transport dan Lahan				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,061,000,000	376,931,000,000	376,931,000,000						
Rekomendasi	16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	2	3	4	5	7	7	9	11	12	14	16	1,196,352,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II						
			-	149,544,000	230,039,875	299,088,000	379,583,875	529,127,875	678,671,875	828,215,875	897,264,000	1,046,808,000	1,196,352,000									
Laporan	2	Layanan Perencanaan dan Keuangan (Bimbingan Teknis Jalur dan Bangunan KA)	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	695,023,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II						
			-	-	-	-	-	-	-	170,000,000	378,720,000	378,720,000	695,023,000	695,023,000	695,023,000	695,023,000						
Meningkatnya Pelayanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	%	35.59	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Pelayanan Prasarana Perkeretaapian	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	33.90	35.59	81,575,000,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Kantor PPK Perencanaan dan Pengawasan 4. Kantor Jabodetabek railway Capacity Enhancement Phase 1			
					0	0	0	0	0	5,795,000,000	10,547,412,500	10,974,912,500	14,740,850,000	19,290,250,000	24,004,625,000	81,575,000,000						
					Dokumen	4	Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9,025,000,000	Kantor PPK Perencanaan dan Pengawasan		
								0	0	0	0	0	2,945,000,000	3,810,312,500	4,237,812,500	5,866,250,000	6,388,750,000	8,490,625,000	9,025,000,000			
					Dokumen	1	Detail Engineering Design (DED) Pengamanan Perlintasan Sebidang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9,500,000,000	Kantor PPK Perencanaan dan Pengawasan	
								-	-	-	-	-	2,850,000,000	4,037,500,000	4,037,500,000	6,175,000,000	6,175,000,000	8,787,500,000	9,500,000,000			
					Dokumen	11	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase 1	2	4	6	7	8	9	11	11	11	11	11	63,050,000,000	Kantor Jabodetabek railway Capacity Enhancement Phase 1		
								-	-	-	-	-	-	2,699,600,000	2,699,600,000	2,699,600,000	6,726,500,000	6,726,500,000	63,050,000,000			
					Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	%	95.00	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	94.64	95.00	582,580,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II	
								-	145,645,000	145,645,000	145,645,000	291,290,000	291,290,000	291,290,000	291,290,000	436,935,000	436,935,000	582,580,000				
					Rekomendasi	4	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	1	3	1	2	2	2	3	3	3	4	582,580,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II		
								-	145,645,000	145,645,000	145,645,000	291,290,000	291,290,000	291,290,000	436,935,000	436,935,000	436,935,000	582,580,000				
					Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	%	65.53	Jalur KA yang menggunakan Persinyalan Elektrik	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.53	3,828,973,000	Subdit Fasilitas Operasi KA
								65,000,000	389,058,000	457,058,000	525,058,000	593,058,000	665,422,000	1,569,312,000	1,569,312,000	1,569,312,000	3,828,973,000	3,828,973,000				
Rekomendasi	8	Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Perkeretaapian	1	2	3	4	6	8	8	8	8	8	8	8	409,364,000	Subdit Fasilitas Operasi KA						
			65,000,000	133,000,000	201,000,000	269,000,000	337,000,000	409,364,000	409,364,000	409,364,000	409,364,000	409,364,000	409,364,000									
Laporan	1	Layanan Perencanaan dan Keuangan (Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi KA)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	256,058,000	Subdit Fasilitas Operasi KA						
			-	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000	256,058,000									
Laporan	3	Layanan Manajemen Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3,163,551,000	Subdit Fasilitas Operasi KA						
			-	-	-	-	-	-	-	903,890,000	903,890,000	903,890,000	3,163,551,000	3,163,551,000	3,163,551,000							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	3.90	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	1,450,000,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA				
				61,366,667	79,093,334	96,820,001	158,186,668	175,913,335	193,640,002	211,366,669	229,093,336	346,820,003	414,546,670	432,273,337	1,450,000,000							
				Penetapan Izin	3	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum/Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA			
				Penetapan Izin	33	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Perpotongan dan atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain	0	3	6	9	11	15	16	19	20	23	24	33		1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA		
Dokumen	1	Pedoman Teknis Bidang Prasarana Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000,000,000	Kantor PPK Urban Transport dan Lahan						
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000							
BA/Laporan	14	Administrasi Kegiatan Lainnya (Verifikasi Subsidi LRT)	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	450,000,000	Kantor PPK Urban Transport dan Lahan						
			61,366,667	79,093,334	96,820,001	158,186,668	175,913,335	193,640,002	211,366,669	229,093,336	346,820,003	414,546,670	432,273,337	1,450,000,000								

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab		
					Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelainan Prasarana Perkeretaapian	%	62.79	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelainan Prasarana Perkeretaapian	50.94	51.43	55.39	56.95	58.78	59.05	59.36	59.85	60.29	60.87	61.27	62.79	15,742,879,000	1. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 2. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA		
				40,000,000	191,978,250	429,906,000	1,842,640,440	2,678,903,858	3,951,691,776	5,819,695,195	6,122,202,945	6,378,887,195	7,439,462,390	7,768,036,140	15,742,879,000					
	Dokumen	44	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	6	11	13	17	22	24	29	33	37	42	44	2,766,567,000	1. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 2. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA			
				40,000,000	191,978,250	429,906,000	606,379,500	820,433,750	1,118,561,500	1,617,322,750	1,874,007,000	2,092,444,500	2,421,018,250	2,766,567,000						
				0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	802,859,000	1. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 2. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA			
				-	-	-	450,408,000	450,408,000	802,859,000	802,859,000	802,859,000	802,859,000	802,859,000	802,859,000	802,859,000					
		Dokumen	10	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	2,673,453,000	Kantor PPK Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)		
					-	-	-	267,345,300	267,345,300	267,345,300	1,109,482,995	1,109,482,995	1,109,482,995	1,951,620,690	1,951,620,690	2,673,453,000				
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	9,500,000,000	Kantor PPK Perawatan		
					-	-	-	518,507,640	1,140,716,808	1,762,925,976	2,592,538,200	2,592,538,200	2,592,538,200	2,592,538,200	2,592,538,200	9,500,000,000				
	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	%	81.82	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	79.55	81.82	36,079,851,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA		
				0	0	0	0	100,000,000	9,790,000,000	13,827,500,000	13,932,831,000	21,200,331,000	21,200,331,000	30,082,831,000	36,079,851,000					
				Dok	2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Penyusunan NSPK dan SOP Bidang Prasarana Perkeretaapian)	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	466,208,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA 5. Tata Usaha	
							-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	205,331,000	205,331,000	205,331,000	205,331,000	466,208,000		
				Dok	22	Penyusunan Kajian Kebijakan/ Standar/ Pedoman Teknis	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	11	22	35,613,643,000	1. Kantor PPK Perencanaan dan Pengawasan 2. Kantor PPK Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)
							-	-	-	-	-	9,690,000,000	13,727,500,000	13,727,500,000	20,995,000,000	20,995,000,000	29,877,500,000	35,613,643,000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	83.50	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.5	770,086,000	Seluruh Unit Kerja		
				-	5,000,000	61,541,000	115,841,000	120,841,000	265,605,500	328,805,500	333,805,500	338,805,500	343,805,500	520,521,500	770,086,000					
	Dokumen	22	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Penyeleenggaraan AKIP)	5	7	8	10	11	13	15	16	17	19	21	22	387,766,000	Seluruh Unit Kerja			
				-	5,000,000	10,000,000	64,300,000	69,300,000	74,300,000	137,500,000	142,500,000	147,500,000	152,500,000	277,966,000	387,766,000					
	Dokumen	4	Layanan Manajemen Keuangan (Penyusunan RKA dan RKT)	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4	382,320,000	Seluruh Unit Kerja			
				-	-	-	51,541,000	51,541,000	51,541,000	191,305,500	191,305,500	191,305,500	191,305,500	242,555,500	382,320,000					
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	20	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	825,903,000	Seluruh Unit Kerja		
				-	125,003,000	125,003,000	391,861,000	500,371,500	500,371,500	608,882,000	608,882,000	608,882,000	608,882,000	717,392,500	825,903,000					
	Dokumen	14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Manajemen Risiko)	6	6	7	9	9	9	11	11	11	13	14	14	825,903,000	Seluruh Unit Kerja			
				-	125,003,000	125,003,000	391,861,000	500,371,500	500,371,500	608,882,000	608,882,000	608,882,000	608,882,000	717,392,500	825,903,000					
	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85.75	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	30	35	45	45	45	45	45	45	45	45	45	85.75	25,054,528,000	Seluruh Unit Kerja		
				337,502,223	8,345,055,923	9,957,430,038	12,275,191,856	14,305,883,936	15,871,943,836	17,177,120,906	18,628,202,406	20,226,224,176	21,525,351,276	22,996,125,776	25,054,528,000					
	Laporan	236	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (Satker)	5	13	26	47	69	90	113	137	163	188	209	236	12,994,309,000	Kantor PPK Kegiatan Rutin dan Sewa Lahan			
				141,729,723	892,220,923	2,132,532,538	4,084,231,856	4,948,861,436	6,100,088,836	7,039,203,406	8,124,222,406	9,359,181,676	10,295,246,276	11,402,958,276	12,994,309,000					
		Laporan	2	Layanan Perkantoran	164,405,000	7,366,400,000	7,678,395,000	7,984,390,000	8,290,385,000	8,596,380,000	8,902,375,000	9,208,370,000	9,511,365,000	9,814,360,000	10,117,355,000	10,473,068,000	10,473,068,000	Kantor PPK Kegiatan Rutin dan Sewa Lahan		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,050,000,000	Kantor PPK Kegiatan Rutin dan Sewa Lahan		
		Laporan	2	Layanan Sarana Internal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,050,000,000	Kantor PPK Kegiatan Rutin dan Sewa Lahan		
					-	22,600,000	45,200,000	67,800,000	890,400,000	913,000,000	935,600,000	958,200,000	980,800,000	1,003,400,000	1,026,000,000	1,050,000,000				
		Dokumen	19	Layanan Manajemen Keuangan	3	4	5	6	7	9	12	13	15	16	17	19	537,151,000	Koordinator SAI		
					31,367,500	63,835,000	101,302,500	138,770,000	176,237,500	262,475,000	299,942,500	337,410,000	374,877,500	412,345,000	449,812,500	537,151,000				
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	6.62	8.08	20.62	32.42	36.01	38.82	40.79	42.77	44.09	45.42	48.07	100.00	830,001,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan I 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	150,000,000	Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II		
Rekomendasi	3	Pemantauan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum/Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000			
Laporan	34	Pemantauan Persetujuan Dokumen Teknis Izin Potongtangan dan atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain	-	3	5	7	10	13	15	17	19	23	27	34	680,001,000	1. Subdit Jalur dan Bangunan Wilayah I dan II 2. Subdit Fasilitas Operasi KA 3. Subdit Kelainan Jalur dan Bangunan 4. Subdit Kelainan Fasilitas Operasi KA				
			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680,001,000				
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Nilai	85.02	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.02	1,026,497,000	Seluruh Unit Kerja		
			-	-	144,942,000	186,585,667	330,277,000	330,277,000	377,001,000	489,739,000	616,463,000	710,449,000	846,497,000	1,026,497,000						
Laporan	19	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0	1	3	6	7	10	12	16	17	19	19	19	1,026,497,000	Seluruh Unit Kerja				
			-	-	-	144,942,000	186,585,667	330,277,000	330,277,000	377,001,000	489,739,000	616,463,000	710,449,000	846,497,000	1,026,497,000					

PIR. DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN


CATUR WICAKSONO
Pembina Tingkat I (Ivib)
NIP. 197004191995031001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN



ditpraska



Dit Prasarana KA



djka.kemenhub.go.id/ditprasaranaka